



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 85 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022**

**MATRIKS PROYEK PRIORITAS STRATEGIS/ *MAJOR PROJECT***  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- B.1 -

**ALOKASI PENDANAAN PROYEK PRIORITAS STRATEGIS/ MAJOR PROJECT  
PADA RKP 2022**

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>
<b>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</b>	<b>11.432.425,8</b>
Industri 4.0 di 6 Subsektor Prioritas	462.403,4
Destinasi Pariwisata Prioritas	3.427.945,9
Kawasan Industri Prioritas dan Smelter	1.820.094,8
Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	967.842,7
Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	127.225,7
Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	576.808,0
Integrasi Pelabuhan Perikanan dan <i>Fish Market</i> Bertaraf Internasional	378.989,1
<i>Food Estate</i> (Kawasan Sentra Produksi Pangan)	2.073.681,3
Pengelolaan Terpadu UMKM	1.597.434,9
<b>Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</b>	<b>9.633.267,4</b>
Pembangunan Wilayah Batam - Bintan	453.957,9
Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar	2.949.870,9
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)	510.799,2
Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong	1.028.251,4
Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	1.583.432,3
Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda	1.905.216,4
PKSN Kawasan Perbatasan Negara	634.986,3
Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria)	566.753,0
<b>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</b>	<b>217.419.786,8</b>
Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan <i>Stunting</i>	34.152.067,0
Pembangunan <i>Science Techno Park</i>	1.599.339,5
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	1.802.512,9
Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	157.746.789,5
Reformasi Sistem Kesehatan Nasional	22.119.077,9



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- B.2 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>
<b>Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</b>	<b>40.846.123,9</b>
Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	1.002.238,0
Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	3.720.912,6
Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90 persen Rumah Tangga)	1.955.293,4
Pemulihan 4 DAS Kritis	1.565.426,3
18 Waduk Multiguna	1.111.967,4
Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	5.212.984,1
Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	1.820.709,9
Kereta Api Makassar-Pare Pare	561.377,2
KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung)	(dibayai oleh Investasi BUMN)
Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung	(dibayai oleh Investasi BUMN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	297.238,7
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong	1.816.494,5
Jembatan Udara 37 Rute di Papua	210.725,4
Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar	1.394.097,2
Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA	48.733,1
Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah	100.000,0
Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km)	(dibayai oleh Investasi Badan Usaha)
Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak	537,1
Transformasi Digital	20.027.389,0
<b>Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</b>	<b>2.371.507,9</b>
Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	241.010,1
Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	2.130.497,8



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- B.3 -

Prioritas Nasional / Major Project	Alokasi (Rp. Juta)
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	286.833,9
Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	208.570,2
Penguatan Keamanan Laut di Natuna	78.263,7

**Keterangan:**

- 1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) *Major Project*;
- 2) Pada beberapa *Major Project* dilaksanakan melalui dukungan pendanaan dari BUMN/Swasta/Daerah, sehingga belanja K/L hanya sebagai fasilitator. Contoh: KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung), Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak, Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung, termasuk *Major Project* terkait pengembangan kewilayahan;
- 3) Rincian proyek dalam *Major Project* masih terus akan dilakukan penajaman dan pendalaman kesiapan pelaksanaan. Beberapa proyek yang masih terpusat (alokasi dan lokusnya) akan terus dipertajam alokasi dan distribusi lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota nya;
- 4) *Major Project* mencakup rincian Belanja K/L dan KPBU, belum mencakup dukungan Transfer ke Daerah dan Badan Usaha (BUMN/Swasta). Identifikasi dan integrasi antar instansi dan sumber pendanaan (K/L, Transfer ke Daerah, KPBU dan Badan Usaha) akan terus dilakukan sampai dengan Pemutakhiran RKP dan APBN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Sekretaris Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman